

**PENGARUH FAKTOR-FAKTOR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
BUDIDAYA JAMUR KAYU TERHADAP TINGKAT KEBERDAYAAN
KELOMPOK PEMBUDIDAYA PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAMAYU
(Studi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil
Hutan Bukan Kayu)**

Oleh :
Kusnadi¹

ABSTRACT

Empowerment essentially is decision making process by people who are consequently implementing the decision itself to achieve collective goal. The Forestry and Plantation Office of Indramayu Regency had initiated the program of wood mushroom cultivation to empower wood mushroom farmers. Since the program rolled out in 2012, as much as 41 groups (47%) of farmers were still active up to present.

The purpose study is to determine factors of policies implementation consisting of communication, resources, tendencies, and structure of bureaucracy which influenced empowerment level of wood mushroom cultivation groups both simultaneously and partially. The method of research used quantitative approach. The regulatory device which became the reference is the Regulation of Forestry Minister, Number P.35/Menhut-II/2007 pertaining to NTFP (Non Timber Forest Products).

Simultaneously results showed that factors of policies implementation influenced positively/significantly towards the empowerment level of wood mushroom cultivation groups. In partially, communication and structure of bureaucracy influenced positively/significantly, while other variables such as resources and tendencies not too significantly influenced the empowerment level of wood mushroom cultivation groups. Somehow the attitude and perspective of wood mushroom cultivation groups towards the program carried by The Forestry and Plantation Office of Indramayu Regency were classified as good and positive.

Keywords: policies implementation, empowerment level

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kehutanan mulai dari periode pasca-Kemerdekaan hingga era Reformasi memiliki prioritas dan target yang berbeda-beda namun secara filosofis diupayakan untuk tujuan yang sama yaitu mengemban amanat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan kehutanan pada era Reformasi diselenggarakan berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menegaskan tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Realitasnya, tujuan bagi kemakmuran rakyat sesuai

amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang semestinya dapat dicapai untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Pada konteks perekonomian nasional, multifungsi hutan yang memiliki manfaat langsung dan tidak langsung yang tidak terbatas belum dikelola secara terintegrasi dan holistik. Pada kondisi ideal sumber daya hutan (SDH) dapat menghasilkan hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang manfaatnya hanya dibatasi oleh kemampuan iptek dan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat. Faktanya pemanfaatan SDH

¹ Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Pascasarjana Unswagati Cirebon

cenderung dilakukan secara parsial dan hanya berorientasi komoditas tunggal yaitu hasil kayu. Situasi semacam ini dirasakan sudah tidak cocok lagi dalam konteks mendukung pembangunan nasional yang bersifat multidimensi. Pada fokus kesejahteraan rakyat dan terutama pengembangan kapasitas dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat banyak, di antara agenda persoalan bangsa yang mengemuka adalah kedaulatan pangan dan ketahanan energi.

Hutan bukan semata-mata kumpulan pohon-pohon yang hanya dieksploitasi dari hasil kayunya saja, tetapi hutan merupakan persekutuan hidup alam hayati atau suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks yang terdiri atas pohon – pohon, semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah, hewan, dan alam lingkungannya. Semuanya itu mempunyai keterkaitan dalam hubungan ketergantungan satu sama lainnya (Arief, 2001).

Sumber Daya Hutan (SDH) mempunyai potensi multi fungsi yang dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi kesejahteraan umat manusia. Manfaat tersebut bukan hanya berasal dari Hasil Hutan Kayu (HHK) seperti yang terjadi saat ini, melainkan juga manfaat Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) sudah dirumuskan oleh pemerintah melalui Departemen Kehutanan (Permenhut: 35/MENHUT-II/2007). Definisi HHBK adalah hasil hutan baik nabati dan hayati beserta produk turunannya dan budidayanya kecuali kayu. Sebagai contoh hasil hutan nabati adalah hasil hutan dari pohon yaitu daun, buah, akar, getah dan lain sebagainya yang bias dimanfaatkan baik untuk menunjang kehidupan atau sebagai komoditi kebudayaan serta ritual keagamaan. HHBK hayati berupa satwa liar yang ada di hutan maupun budidayanya di luar dan di dalam kawasan hutan. HHBK yang lain dapat berupa pangan, obat seperti jamur dan lain sebagainya.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya jamur kayu di Kabupaten Indramayu telah digulirkan semenjak tahun

2012, dengan sasaran kelompok pembudidaya jamur kayu yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Berdasarkan catatan, sampai dengan tahun 2015, kelompok pembudidaya yang telah ikut program ini sebanyak 72 kelompok.

Berdasarkan evaluasi, dari 72 kelompok tani penerima bantuan tahun anggaran 2012 s/d 2015, sampai saat ini masih terdapat 41 kelompok yang masih aktif berbudidaya jamur kayu, sementara sisanya sebanyak 31 kelompok sudah tidak aktif berbudidaya jamur kayu.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, timbul keraguan apakah kegiatan tersebut dapat memberdayakan kelompok pembudidaya? Pertanyaan tersebut layak untuk diapungkan karena berdasarkan data di atas prosentase kelompok pembudidaya yang masih aktif masih rendah yaitu sebesar 57 %. Untuk itu penulis bermaksud melaksanakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam bentuk penelitian. Keluaran dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat selanjutnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh implementasi kebijakan program budidaya jamur kayu terhadap tingkat keberdayaan kelompok pembudidaya pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu, melalui penyelidikan mendalam dan analisa berdasarkan pendapat/persepsi para pihak yang berhubungan langsung dengan program. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara penelitian lapangan atau metode survey yang menggunakan instrument berupa kuesioner (angket). Penelitian survey dengan kuesioner ini memerlukan responden dalam jumlah yang cukup agar validitas temuan ini bisa dicapai dengan baik. Hal ini wajar, sebab apa yang digali dari kuesioner itu cenderung

informasi umum tentang fakta atau opini yang diberikan oleh responden (Irawan, 2006:109).

1. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan obyek atau sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masalah penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok pembudidaya jamur kayu yang mendapat bantuan program tahun anggaran 2014 s/d 2015 yaitu sebanyak 629 orang.

Berdasarkan hasil perhitungan formula pendapat *Slovin*, maka ukuran sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebesar **125 orang**. Untuk penelitian ini, proses pemilihan sampel menggunakan metode *simple random sampling*.

2. Identifikasi Variabel

Identifikasi variabel dalam penelitian ini adalah:

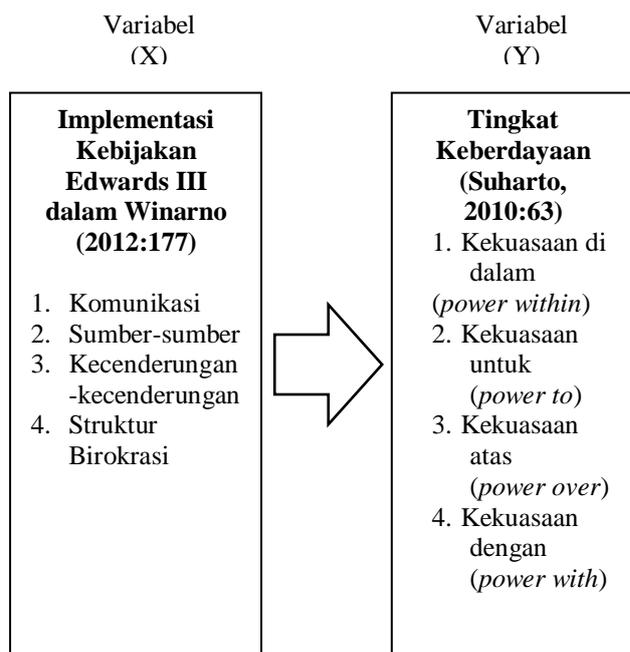
1. Variabel bebas (X) adalah Model Implementasi Kebijakan Publik Edward III dalam Winarno yang terdiri dari faktor-faktor : Komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi
2. Variabel terikat (Y) adalah tingkat keberdayaan kelompok pembudidaya jamur kayu di Kabupaten Indramayu.

3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi, yaitu mengukur keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah yang jelas yang harus diteruskan kepada personil yang tepat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.
- b. Sumber-sumber, yaitu mengukur sumber-sumber yang penting dalam pelaksanaan kebijakan meliputi staf, keahlian-keahlian, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.
- c. Kecenderungan-kecenderungan, yaitu mengukur perspektif-perspektif para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan.

- d. Struktur birokrasi, yaitu mengukur prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar (*Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi birokrasi dalam implementasi kebijakan.
- e. Tingkat keberdayaan (Y) yaitu indikator-indikator tingkat keberdayaan kelompok pembudidaya jamur kayu berdasarkan tingkat setuju.



4. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas yang terdiri dari Komunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan dan Struktur birokrasi terhadap variabel terikat yaitu tingkat keberdayaan kelompok pembudidaya (Y).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Pelaksanaan Program Budidaya Jamur Kayu pada Dinas Keutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu

Acuan dasar Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan program budidaya jamur kayu adalah Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa jamur kayu/tiram (*Pleurotus ostretus*) termasuk dalam hasil hutan bukan kayu kategori karbohidrat/pati yang menjadi kewenangan kehutanan. Program budidaya jamur kayu pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu bersifat *Revolving* (bergulir), dimana kelompok pembudidaya yang mendapatkan bantuan diharapkan menggulirkan modal yang didapatkan dari produksi jamur kayu yang dihasilkan untuk mengadakan kembali baglog jamur kayu baik melalui pembelian baglog jamur kayu maupun untuk membiayai pembuatan baglog jamur kayu bagi kelompok yang sudah mampu memproduksi sendiri baglog jamur kayu.

Program budidaya jamur kayu pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu yang telah dilaksanakan mencapai beberapa keberhasilan antara lain sebagai berikut:

1. Terbukanya lapangan kerja

Budidaya jamur kayu/tiram mampu menyerap tenaga kerja antara 5 – 10 orang per kelompok, dengan upah harian antara Rp. 40.000 s/d Rp. 50.000 per orang (hasil wawancara dengan kelompok pembudidaya).

2. Meningkatkan produksi baglog jamur kayu/tiram

Program dari Dinas telah meningkatkan jumlah baglog yang dikelola menjadi 4.500 baglog/kelompok. Pun demikian dengan kelompok pembudidaya yang mendapat bantuan peralatan, yang mengalami peningkatan produksi baglog di kisaran 5.000 s/d 10.000 baglog/bulan.

3. Memenuhi kebutuhan pasar akan jamur kayu/tiram

Rata-rata produksi jamur per baglog sekitar 3-4 ons/baglog ukuran 1 kg, dengan bantuan baglog 4.500/kelompok, produksi jamur meningkat menjadi 1.350 s/d 1.800 kg jamur/kelompok selama periode 4-5 bulan.

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah di bidang ekonomi, Program budidaya jamur kayu di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu

diharapkan mampu mengangkat sektor perekonomian masyarakat khususnya pembudidaya jamur kayu/tiram. Dengan harga jamur basah di pasaran wilayah Indramayu saat ini rata-rata berkisar Rp. 10.000 s/d Rp. 12.000/kg, maka pendapatan kelompok berkisar antara Rp. 13.500.000 s/d Rp. 18.000.000 per periode atau Rp. 3.375.000 s/d Rp. 4.500.000/bulan.

b. Uji Serempak (Uji F)

Berdasarkan nilai F-hitung dari semua variabel bebas sebesar $2.975 > F$ Tabel (2,44), dengan nilai probabilitas untuk F statistik (signifikansi) adalah $0,000 < \alpha = 0,05$. Maka keputusan yang di ambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti semua variabel bebas (komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi) mempunyai pengaruh yang signifikan atau berarti secara simultan terhadap variabel terikatnya (tingkat keberdayaan kelompok pembudidaya) pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

c. Uji Parsial (Uji t)

- Berdasarkan hasil regresi nilai t-hitung variabel komunikasi (1.659) > nilai t. tabel (1.657) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti variabel komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberdayaan kelompok pembudidaya.
- Nilai t-hitung variabel sumber-sumber (0.244) < nilai t. tabel (1.657) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti variabel sumber-sumber secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel tingkat keberdayaan kelompok pembudidaya jamur kayu/tiram.
- Nilai t-hitung variabel kecenderungan (0.866) < nilai t. tabel (1.657) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti variabel kecenderungan-kecenderungan secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel tingkat keberdayaan kelompok pembudidaya jamur kayu/tiram.
- Nilai t-hitung variabel Struktur birokrasi (1.773) > nilai t. tabel (1.657) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti variabel struktur birokrasi secara parsial mempunyai pengaruh yang

positif/signifikan terhadap variabel keberdayaan kelompok pembudidaya.

2. Pembahasan

- Pengaruh Komunikasi terhadap Tingkat Keberdayaan

Komunikasi dalam pelaksanaan program pengembangan budidaya jamur kayu/tiram dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok peserta program. Dalam pendampingan kepada kelompok binaan, petugas dinas telah dibekali pengetahuan yang cukup tentang budidaya jamur kayu, hal ini tercermin dalam kuesioner yang di sebarakan kepada kelompok tani pembudidaya yang menyatakan “setuju” terhadap pernyataan “petugas pelaksana pada Dinas telah melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada kelompok” sebanyak 93.6 %.

Pembinaan dan monitoring kepada kelompok dilaksanakan agar kelompok memahami dan melaksanakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam budidaya jamur kayu/tiram.

- Pengaruh Sumber-Sumber terhadap Tingkat Keberdayaan.

Petugas pendamping selain telah dibekali pengetahuan tentang budidaya jamur kayu, juga diberikan wewenang yang diperlukan dalam menterjemahkan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan program budidaya jamur kayu.

Pada hasil regresi koefisien regresi, uji serempak (uji F) menunjukkan nilai yang positif/signifikan, tetapi pada uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel sumber-sumber tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain sebagaimana diuraikan berikut :

1. Staf

Dalam pelaksanaan program budidaya jamur kayu pada Dinas ini peneliti melihat bahwa dari sisi jumlah, petugas pendamping masih sangat minim. Untuk mendampingi kelompok pembudidaya jamur kayu yang tersebar di wilayah Kab.Indramayu, petugas pendamping yang tersedia hanya terdiri dari 3 orang. Hal ini dikarenakan jumlah personel

pada seksi yang bersangkutan memang terbatas.

2. Wewenang

Wewenang merupakan sumber lain yang penting bagi implementasi kebijakan. Wewenang ada dalam banyak bentuk, dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Program budidaya jamur kayu yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Indramayu bersifat *Top Down*. Dalam pemberian bantuan fasilitas peralatan budidaya jamur kayu terutama pressbaglog, dinas tidak melakukan audiensi terlebih dahulu dengan kelompok pembudidaya tentang fasilitas apa yang mereka butuhkan.

Dalam hal ini proses komunikasi dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana belum berjalan baik antara dinas dengan kelompok pembudidaya jamur kayu, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber tidak memberikan pengaruh yang signifikan atau dapat dikatakan memberikan sedikit pengaruh terhadap tingkat keberdayaan kelompok pembudidaya.

- Pengaruh Kecenderungan-kecenderungan terhadap Tingkat Keberdayaan.

Sikap dan perilaku pelaksana yang positif, motivasi yang tinggi dan ketaatan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Persepsi responden yang setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang diuraikan dalam kuesioner disebabkan karena kelompok pembudidaya dapat menerima dan melaksanakan program yang digulirkan oleh Dinas

Program budidaya jamur kayu yang dilaksanakan Dinas juga memberikan pelajaran kepada kelompok tentang bagaimana dinamika kelompok berjalan. Pembagian tugas dan wewenang terhadap anggota kelompok misalnya, harus jelas. Transparansi terhadap jumlah bantuan yang diterima dan produksi jamur yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan ketua kelompok kepada anggotanya.

- **Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Tingkat Keberdayaan.**

Persepsi responden yang setuju terhadap pernyataan-pernyataan dalam struktur birokrasi dengan nilai rata-rata sebesar 69,33 %, dimana responden menyatakan setuju terbesar terhadap pernyataan “juklak dan juknis program budidaya jamur kayu sudah jelas dan dimengerti oleh kelompok” sebesar 93,6 %.

Berdasarkan analisis deskriptif lebih dominan responden berpendapat bahwa variabel struktur birokrasi yang ada mempunyai penilaian yang baik. Juga sejalan dengan hasil regresi bahwa koefisien regresi uji serempak (uji F) dan uji parsialnya (uji t) menunjukkan nilai yang positif/signifikan.

- **Tingkat Keberdayaan Kelompok Pembudidaya Jamur Kayu**

Dari hasil analisis kuesioner, responden berpendapat bahwa program budidaya jamur kayu mempunyai penilaian yang baik. Dimana indikator nomor 3 yaitu “kelompok pembudidaya memiliki kemampuan untuk membeli komoditas barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari” mendapat prosentase tertinggi yaitu sebesar 66.4 %. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa kelompok pembudidaya mendapat penghasilan lebih besar dari sebelum mendapat bantuan dari Dinas.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Berdasarkan uji serempak (uji F) didapatkan bahwa nilai F hitung dari semua variabel bebas sebesar $2.975 > F$ Tabel 2,44 dengan nilai probabilitas untuk F statistik (signifikansi) adalah $0,000 < \alpha = 0,05$. Maka keputusan yang di ambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti semua variabel bebas (komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi) mempunyai pengaruh yang signifikan atau berarti secara simultan terhadap variabel terikatnya (tingkat keberdayaan kelompok pembudidaya) pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

b. Pada uji parsial (uji t) variabel komunikasi dan struktur birokrasi diperoleh hasil H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti kedua variabel mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel keberdayaan kelompok pembudidaya, sedangkan variabel sumber-sumber dan kecenderungan-kecenderungan diperoleh hasil H_0 diterima dan H_a ditolak. Dalam koefisien regresi, sumber-sumber mempunyai nilai 0.044 yang berarti bahwa sumber-sumber memberikan pengaruh sebanyak 4,4% terhadap tingkat keberdayaan, 95,6 % dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, pada variabel kecenderungan-kecenderungan mempunyai nilai 0.155 yang berarti bahwa sumber-sumber memberikan pengaruh sebanyak 15,5% terhadap tingkat keberdayaan, 84,5 % dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Saran

- Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan pada saat ini, agar kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan masyarakat, hendaknya kebijakan bersifat *Bottum Up*.
- Pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya jaringan kerja yang lebih luas antar semua *stakeholder* pembangunan untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat pada tiap-tiap komunitas adalah bersifat unik atau berbeda antar satu komunitas dengan yang lainnya, untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai indikator-indikator keberdayaan dalam rangka memperkaya kasanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andersen, E. James, 1997, *Public Policy-Making, Third Edition*. New York, Holt, Rinehart and Winston.
- Craswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative*

- Approaches*. California: SAGE Publication, Inc., 1994.
- Dunn, N., William, 1994, *Public Policy Analysis: An Introduction*. Edisi Ke-2, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., A Simon & Schuster Co., Terjemahan dari Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R. 1995, *Understanding Public Policy* New Jersey: Prentice Hall.
- Freidman, J and Sullivan F., 1974, *The Absorbition of Labour in The Urban Economy: The Case of Developing Country*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Grindle, Merilee S. (ed) 1980, *Politics and policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Kartasasmita, Ginandjar, Pembangunan Untuk rakyat ; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, 1996, Jakarta, Cesindo.
- Gozali, Toto Syatori Nasehudin, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Jones, Charles O., 1991, *Pengantar Kebijakan Publik, (Public Policy)*, Jakarta, Rajawali Press.
- Mubyarto, 1997, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Jogjakarta, PT. Aditya Media.
- Nakamura, Robert. T, dan F. Smallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, New York, St. Martin Press.
- Nawawi, Ismail, 2009, *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, Surabaya: PMN.
- Nasehudin S Toto dan Nanang Gozali, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Pustaka Setia.
- Nugroho, Riant 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Parson, Wayne. *Public Policy*, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana, 2006.
- Siagian, Sondang. 1983. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, CV. Haji Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik, 2012 Bandung, CV. Alfabeta.
-, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* 2010 Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 2012 Bandung, CV. Alfabeta.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)* 2012, Jakarta, PT. Buku Seru.

B. Peraturan

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Indramayu